

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,
MOTIVASI KERJA DAN KETAATAN PADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**

SKRIPSI



Nama : Elvira Irma Nasution

NIM : 222014504

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,
MOTIVASI KERJA DAN KETAATAN PADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Elvira Irma Nasution
NIM : 222014504**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan,
Motivasi Kerja dan Ketaatan pada Perundangan Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Muara Enim
Nama : Elvira Irma Nasution
NIM : 222014504
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan

Pada tanggal, Februari 2019

Pembimbing I,

Betri, S.E., Ak., M.Si., CA

NIDN/NBM : 0216106902/944806

Pembimbing II,

Mizan, S.E., Ak., M.Si

NIDN/NBM : 020647101/859196

Mengetahui,

Dekan

dan Ketua Program Studi Akuntansi



Betri, S.E., Ak., M.Si., CA

NIDN/NBM : 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elvira Irma Nasution

Nim : 222014504

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi yang telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2019



ABSTRAK

Elvira Irma Nasution/222014504/Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Motivasi Kerja dan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.

Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah, motivasi kerja dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, motivasi kerja dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian ini adalah asosiatif. Penelitian ini dilakukan pada organisasi perangkat daerah kabupaten Muara Enim. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 sampel, dengan teknik *Proportionate Stratified Random Sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau hak angket berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang disebar kepada responden secara langsung pada masing masing organisasi perangkat daerah, dari hasil kuesioner dengan analisis data kualitatif. Pengujian yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, motivasi kerja dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Motivasi Kerja, Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan, Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRACT

Elvira Irma Nasution/ 222014504/ Effect of the Application of Government Accounting Standards, Work Motivation and Compliance with Legislation Regulations Regarding the Quality of Financial Statements in the Regional Devices Organization of Muara Enim Regency.

The formulation in this study is how the application of government accounting standards, work motivation and compliance with laws and regulations on the quality of financial statements? The purpose of this study was to determine the effect of the application of government accounting standards, work motivation and adherence to laws and regulations on the quality of financial reports. The type of this research is associative research. This research was conducted at the device organization in Muara Enim district. The sample in this study was 45 samples, with the Proportionate Stratified Random Sampling technique. The data used in this study are primary data. The technique of data collection is done by using a questionnaire or inquiry rights in the form of written questions that are distributed directly to the respondents in each organization of the regional apparatus, from the results of the questionnaire with qualitative data analysis. The tests used are validity test, reliability test, classic assumption test, hypothesis test. Based on the results of research that has been conducted on the Regional Devices Organization of Muara Enim Regency, it shows that the application of government accounting standards, work motivation and compliance with laws and regulations simultaneously influence the quality of financial statements.

Keywords: Government Accounting Standards, Work Motivation, Compliance with Legislation, Quality of Financial Statements

PRAKATA



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan bagi Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan.

Penulisan skripsi ini membahas tentang laporan keuangan daerah kabupaten Muara Enim dampaknya pada tingkat kualitas laporan keuangan daerah. Karena kualitas laporan keuangan daerah merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada orang tuaku, Ayah Zainul Hamsar Nasution dan Ibu Masdelina Nasution, adikku Sarina Sidauli Nasution, Elyssa Salsabila Nasution dan Khanza Sahira Zailin Nasution yang telah mendoakan dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Betri, S.E Ak., M.Si., CA dan Bapak Mizan, S.E., Ak., M.Si selaku dosen pembimbingku yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat dan juga saran-saran dengan ikhlas dan penuh dengan kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta Staff dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs.Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta Staff dan karyawan/karyawati.

3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,Ak.,M.Si.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku ketua dan wakil Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,Ak.,M.Si.,CA dan Bapak Mizan, S.E., Ak., M.Si selaku pembimbing skripsi saya.
5. Bapak Drs. Sunardi, S.E, Bapak M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Ketua Penguji, Anggota Penguji I dan Anggota Penguji II.
6. Bapak H. Fadhil Yamaly, S.E., Ak., M.M selaku pembimbing akademik saya.
7. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh satff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak Ir. H. Ahmad Yani, M.M dan H. Juarsah, S.H selaku Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim.
9. Semua pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi laporan ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari laporan ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Aamiin

Wassalamu'alikum Wr.Wb

Palembang, Februari 2019

Elvira Irma Nasution

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRAKATA	v
HALAMAN DAFTAR ISI	vii
HALAMAN DAFTAR TABEL	x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
 BAB II KAJIAN PUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
A. KAJIAN PUSTAKAAN.....	15
1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	15
2. Standar Akuntansi Pemerintah	16
3. Motivasi Kerja.....	23

4. Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan.....	26
5. Kualitas Laporan Keuangan.....	28
B. Penelitian Sebelumnya	32
C. Kerangka Pemikiran	38
D. Hipotesis	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	44
C. Operasionalisasi Variabel	45
D. Populasi dan Sampel	46
E. Data yang Diperlukan	48
F. Metode Pengumpulan Data	49
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	63
1. Gambaran Umum Kabupaten Muara Enim.....	63
2. Visi dan Misi Kabupaten Muara Enim	66
3. Uji Validitas dan Reliabilitas	70
4. Uji Asumsi Klasik	75
a. Uji Normalitas Data	75
b. Uji Multikolinearitas	76
c. Uji Heteroskedastisitas	77
d. Uji Autokorelasi.....	78

5. Pengujian Hipotesis	78
a. Pengujian Regresi Berganda.....	78
b. Koefisien Determinan	80
c. Pengujian Hipotesis Secara Simultan.....	82
d. Pengujian Hipotesis Secara Parsial	83
B. Pembahasan.....	84
1. Perbandingan Hasil Dengan Teori.....	86
2. Perbandingan Hasil Dengan Penelitian Sebelumnya.....	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Data Opini LKPD Kabupaten Muara Enim 2012-2016	10
Tabel III.1 Daftar Organisasi Perangkat Daerah Kab Muara Enim	44
Tabel III.2 Operasionalisasi Variabel	45
Tabel IV.1 Hasil Uji Validitas Variabel SAP	71
Tabel IV.2 Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi Kerja	72
Tabel IV.3 Hasil Uji Validitas Variabel KPPP	72
Tabel IV.4 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan	73
Tabel IV.5 Pengujian Reliabilitas	74
Tabel IV.6 Uji Multikolinieritas	76
Tabel IV.7 Uji Autokorelasi	78
Tabel IV.8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	79
Tabel IV.9 Hasil Koefisien Determinan (Adjusted R ²)	81
Tabel IV.10 Hasil Uji f	82
Tabel IV.11 Hasil Uji t	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	38
Gambar IV.1 Uji Normalitas Data.....	75
Gambar IV.2 Uji Heteroskedasitas	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Jadwal Penelitian
Lampiran 2	Surat Pernyataan Selesai Riset
Lampiran 3	Kartu Aktivitas Bimbingan
Lampiran 4	Sertifikat AIK
Lampiran 5	Sertifikat TOEFL
Lampiran 6	Hasil Uji SPSS
Lampiran 7	Tabel F
Lampiran 8	Tabel t
Lampiran 9	Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip penerapan standar akuntansi dalam tata kelola keuangan daerah yang baik merupakan suatu keharusan yang harus diterapkan di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk menciptakan penerapan standar akuntansi dalam tata kelola keuangan daerah baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu usaha untuk mewujudkan penerapan standarakuntansi pemerintah pengelolaan laporan keuangan pemerintah adalah dengan diaturnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk, isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun serta disajikan sesuai dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Di Indonesia sistem pemerintahan terbagi menjadi dua yakni pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945, dalam pemerintahan pusat sistem pemerintahannya terdiri dari : Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Presiden RI, dan Wakil Presiden RI. Sedangkan sistem pemerintahan daerah terdiri dari :

Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa. Pemerintah Indonesia dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya di daerah, berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Peningkatan akuntabilitas dan keandalan dalam pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan melalui penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), termasuk mendukung pelaksanaan penerapan perkembangan akuntansi pemerintahan saat ini. Setelah pemberlakuan dari *single entry* ke *double entry accounting* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, dengan keluarnya Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 merupakan jembatan kedua dalam akuntansi keuangan pemerintahan Indonesia untuk mengantarkan dari akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual/CTA*) ke arah akuntansi berbasis akrual penuh (*full accrual*) dengan masa tenggang selama empat tahun.

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan suatu negara akan sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Negara Indonesia telah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Adapun pengertian Standar Akuntansi Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No.71

tahun 2010 yaitu “prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Meskipun seperangkat perundangan dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan uang publik. Penerapan sistem keuangan pada prakteknya tidak terlepas dari persepsi, wawasan, dan profesionalisme dari aparatur pemerintahnya itu sendiri Jannaini (2012). Hal ini berimplikasi terhadap kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh setiap satuan kerja pemerintah.

SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), yaitu SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu SAP dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah. PSAP dapat dilengkapi dengan Interpensi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP) atau buletin teknis SAP, IPSAP, dan buletin teknis SAP disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP berbasis akrual dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah. PSAP dan kerangka konseptual

akuntansi pemerintah dalam rangka SAP berbasis akrual dimaksud tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

SAP berbasis akrual terlebih dahulu dilakukan penerapan SAP berbasis kas menuju akrual secara bertahap. SAP berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Sama seperti SAP diatas SAP berbasis kas menuju akrual juga dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Aturan ini tercantum pada Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sebelumnya, SAP berbasis kas menuju akrual digunakan dalam SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, SAP harus diaplikasikan untuk penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2010. Artinya bahwa penyajian laporan keuangan tahun 2010 sudah harus sesuai dengan SAP. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan di dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Bagi para pengawas keuangan daerah, laporan keuangan yang berbasis standar akuntansi memberikan tantangan baru dalam peningkatan aspek pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Tantangan tersebut adalah kemampuan pihak pengawas dalam mengungkap kewajaran penyajian laporan keuangan

melalui opini yang diberikannya. Kemampuan ini tentunya diharapkan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan instansi pemerintah yang baik. Pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan menjamin bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara benar dan wajar sesuai standar akuntansi keuangan pemerintahan sehingga informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut pengguna dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengambil keputusan.

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Bupati/Wali Kota dengan persetujuan DPRD Kabupaten/Kotamadya), untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Oleh karena itu dalam pembuatan Peraturan Daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, peran penyusun laporan keuangan menjadi sangat penting. Penyusun laporan keuangan hendaknya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang memadai dalam menyusun laporan keuangan, dalam hal ini laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Motivasi kerja adalah suatu perangsang keinginan daya gerak kemauan bekerja seseorang, setiap motivasi mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan motivasi antara lain : a. mendorong gairah dan semangat kerja karyawan, b. meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, c. meningkatkan produktivitas kerja karyawan d. mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan, e. menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, dan f. meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan Malayu (2012: 191).

Selain motivasi kerja, diperlukan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam proses penyajian laporan keuangan. Mengingat pentingnya ketaatan terhadap perundangan dalam sebuah lingkungan kerja, maka perusahaan atau instansi pemerintah harus dapat mempertahankan keberadaan sumber daya manusia yang mampu menerapkan hal tersebut. Untuk mempertahankan hal tersebut, maka diperlukan motivasi kerja yang diberikan oleh pimpinan atau atasan kepada karyawan agar dapat terus mempertahankan kinerja yang baik dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja menjadi faktor yang paling dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, dalam hal ini laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu di wujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ke empat karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat

dibandingkan, dapat dipahami merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala OPD selaku pengguna anggaran diharuskan menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya. Pencatatan atas transaksi tersebut sebagai bahan dalam menyiapkan laporan keuangan OPD, laporan keuangan OPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang harus disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Motivasi kerja mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan Hasibuan (2013: 141). Motivasi dapat diciptakan dengan mengadakan pengaturan kerja yang baik, sehingga menimbulkan motivasi kerja bagi aparatur yang menyebabkan mereka mau mengerahkan kemampuan yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya

motivasi kerja dari aparatur tentunya pelaksanaan fungsi manajemen keuangan akan dapat diwujudkan. Motivasi kerja berarti menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun seseorang menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustrasi Goleman (2011: 514).

Motivasi kerja adalah sesuatu yang memulai gerakan, sesuatu yang membuat orang bertindak atau berperilaku dalam cara-cara tertentu. Adapun motivasi pada seorang itu tergantung pada kekuatan dari motivasi itu sendiri, seberapa kuat motivasi seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai yang berada di luar individu, sebagai suatu harapan untuk mendapat suatu penghargaan, suatu arah yang dikehendaki oleh motivasi.

Ketaatan pada peraturan perundangan merupakan elemen penting yang secara langsung berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya hal ini, diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik. Namun, pemerintah daerah cenderung tidak mengimplementasikan peraturan perundangan yang dimaksud. Berdasarkan hubungan dengan pengertian undang-undang, dalam arti material, dan undang-undang dalam arti formal. Dalam konteks ini, undang-undang yang dibentuk atas persetujuan DPR dan disahkan oleh Presiden, yang isinya mengikat rakyat. Secara hierarki di Indonesia, peraturan-peraturan perundangan tentang keuangan negara diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang, keputusan Presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Ketaatan pada peraturan perundangan adalah suatu bentuk kepatuhan pada aturan-

aturan yang telah dibuat oleh lembaga negara yang berwenang untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara dan berskala nasional.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2012-2016 yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selain untuk hal yang dikecualikan dalam opini BPK dan dampak-dampaknya telah memenuhi kriteria kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, opini tersebut diberikan karena dilihat dari efektivitas motivasi kerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Opini laporan keuangan yang diberikan oleh BPK juga mempertimbangkan materialitas penyajian akun, antara komponen laporan keuangan dan keseluruhan informasi laporan keuangan. Data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muara Enim serta temuannya dari tahun 2012-2016 disajikan dalam tabel I.1.

Tabel I.1**Opini LKPD Kabupaten Muara Enim**

Tahun	Opini Audit
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber: www.bpk.go.id,2018

Hal ini menunjukkan bahwa opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) didapat atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sejak tahun 2012-2016. Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendapat penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2012 karena beberapa hal yang berkaitan dengan terdapat rekening yang belum ditutup tetapi tidak diakui sebagai rekening kas daerah, terdapat penitipan dana daerah dari rekening kas daerah ke rekening diluar kas daerah (dana blokir), realisasi asuransi kesehatan pimpinan dan anggota DPRD dan belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum dipotong pajak penghasilan 21 dan realisasi penggunaan biaya bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu tidak tepat sasaran dan merugikan keuangan daerah. Belum lengkapnya pendataan aset yang dilakukan menjadi salah satu

penyebab [Pemerintah](#) Kabupaten Muara Enim belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2013.

Masih ditemukannya sistem pencatatan penerimaan pajak yang lemah sehingga terdapat transaksi pembatalan penerimaan (*reversal*) yang tidak dapat diyakini data penggantinya, terjadi minus ekuitas dana lancar dan terjadi defisit pada Tahun Anggaran 2014. Pemerintah Kabupaten Muara Enim belum menyelesaikan permasalahan suspen belanja negara yaitu berupa selisih pengakuan belanja oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dengan Kementerian/Lembaga (KL) Tahun Anggaran 2015. Terdapat beberapa rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK RI yang belum ditindak lanjuti, pemerintah tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas pencatatan fisik kas yang merupakan bagian fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) antara lain terkait dengan permasalahan selisih dan ketidakkonsistenan pencatatan kas di bendahara pengeluaran dan Kas Hibah Langsung (KHL) serta selisih kiriman uang Tahun Anggaran 2016.

BPK RI masih menemukan kelemahan dalam penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kelemahan tersebut ditemukan pada penyajian akun aset tetap, aset lainnya, belanja barang, belanja modal, dan belanja daerah lainnya. Juga terdapat kendala-kendala saat pelaksanaan tugas konstitusionalnya yaitu pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim seperti Pemerintah Kabupaten Muara Enim terlambat menyampaikan data dan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.

Penelitian sebelumnya Ningtyas (2015) yang melakukan penelitian untuk menguji apakah efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Sidoarjo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada indikator penilaian pada indikator pengukuran motivasi kerja dan ketaatan pada peraturan perundangan, tidak menggunakan variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan memiliki objek penelitian yang berbeda.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari, dkk. (2014) untuk mengetahui apakah pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada dinas-dinas di pemerintah Kabupaten Jembrana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman SAP dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jembrana. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini menggunakan pengukuran motivasi kerja dan ketaatan pada peraturan perundangan, tidak menggunakan variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan memiliki objek penelitian yang berbeda.

Berdasarkan dari uraian latar belakang, beberapa penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil penelitian ternyata masih menggambarkan hasil yang

belum konsisten, dan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan namun kualitas laporan keuangan yang dihasilkan masih belum berpengaruh dan belum mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itulah peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Motivasi Kerja, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, motivasi kerja, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, motivasi kerja, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Sebagai bukti empiris tentang ada pengaruh standar akuntansi pemerintah, motivasi kerja, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan, dan dapat menambah wawasan.

2. Bagi Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Muara Enim

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana hubungan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, motivasi kerja, dan ketaatan pada perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain itu sebagai masukan dalam laporan keuangan, berapa penting motivasi kerja kepada karyawan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan kedepannya.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012-2016. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Di Kota Palembang.
- Dhedy Triwardana. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar, Februari 2017).
- Goleman, Daniel. 2010. *Kecerdasan Emosional*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utami.
- Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Heizer, Jay dan Barry Render. 2010. *Manajemen Operasi*. Edisi Ketujuh Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusumah Arif Ardi. 2012. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya).
- Lodhrakenjana Baja dan Luthan Elvira. 2013. Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, Komitmen Pegawai Akuntansi Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kota Depok.
- Ningtyas. 2015. Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Nurlaila. 2013. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Enrekang)

- Nuryaman Dan Veronica Christina. 2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi Dan Bisnis*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Razi Riska Fahrul. 2017. Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
- Sanusi, Anwar. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari. 2014. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Sukmaningrum. 2012. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- Sujarweni, V Waratna. 2014. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress
- Sujarweni, V Waratna. 2015 *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Susanto Puji. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung.

Sutrisno, Edy. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana.

Sondang P. Siagian. 2012. *Teori Motivasi Dan Aplikasinya*. Penerbit Rineka Cipta

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

www.bpk.go.id

Palembang.bpk.go.id